

*Internal Control Analysis of Fixed Assets at The Social Services
Department of Jambi City*

**Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap Pada
Dinas Sosial Kota Jambi**

Annisa Soraya^{1)*}

Iskandar Sam²⁾

Misni Erwati³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{2&3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{*)} Korespondensi

Email: annisator@gmail.com¹⁾, iskandar_sam@unja.ac.id²⁾, misni_erwati@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the Internal Control of Fixed Assets at the Jambi City Social Service has been implemented effectively and efficiently. The analytical method used is descriptive analysis. Based on the results of interviews with the Head of the Jambi City Social Service, a total value of 5 (five) elements of the fixed asset internal control system at the Jambi City Social Service was calculated, which was 94.33% which belonged to the very effective criteria consisting of a Control Environment of 26.25%, Risk Assessment is 20%, Control Activities are 23.08%, Information and Communication is 10% and Monitoring is 15%. Weaknesses in the internal control of fixed assets at the Jambi City Social Service Office are the absence of training for Jambi City Social Service employees regarding the management and maintenance of fixed assets, and all Jambi City Social Service fixed assets are not or have not been insured.

Keywords: Internal Control, Fixed Assets

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengendalian Intern terhadap Aset Tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi telah diterapkan secara efektif dan efisien. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi diteloh dihitung total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi yaitu sebesar 94,33% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif yang terdiri Lingkungan Pengendalian sebesar 26,25%, Penilaian Risiko sebesar 20%, Kegiatan Pengendalian sebesar 23,08%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10% dan Pemantauan sebesar 15%. Kekurangan dalam pengendalian intern aset tetap pada Kantor Dinas Sosial Kota Jambi adalah pada belum adanya pemberian pelatihan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Jambi mengenai

pengelolaan dan perawatan aset tetap, dan seluruh aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi tidak atau belum di asuransikan.

Kata kunci: Pengendalian Intern, Aset Tetap

1. PENDAHULUAN

Ritonga (2012:173) dalam bukunya Akuntansi Keuangan daerah mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, yaitu (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap sangat berperan penting bagi Sektor Swasta maupun Pemerintahan. Bagi Sektor Swasta, aset tetap memiliki peranan penting dalam membantu proses menghasilkan produksi baik berupa peralatan mesin, kendaraan operasional, tanah, bangunan maupun aset tetap lainnya. Siregar (2014) menyebutkan bahwa bagi Pemerintahan, Aset tetap sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional pemerintahan demi tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional yang mendukung pencapaian fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar terhadap aset tetap.

Pengendalian internal terhadap aset tetap adalah keseluruhan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin dan mengarahkan keseluruhan proses perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, penatausahaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan salah satu dari beberapa instansi pemerintah yang memiliki fungsi khusus dan menggunakan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. Instansi ini bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan operasinya instansi ini harus menggunakan aset tetap demi tercapainya keakuratan dan kelengkapan data. Beraneka ragam aset tetap yang digunakan memiliki sumber dana dari pemerintah, oleh karena itu aset tetap yang dimilikinya harus benar-benar diperhatikan dan pengendalian yang maksimal agar tercapainya ketepatan penggunaan dana pemerintah. Jumlah aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi per 31 Desember 2020 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Aset Tetap Dinas Sosial per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	578.000.000
3	Gedung dan Bangunan	-
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lainnya	-
Jumlah Aset Tetap		578.000.000

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi, 2021

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap yang ada di Dinas Sosial Kota Jambi cukup besar jumlahnya karena itu butuh pengendalian intern terhadap aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi. Permasalahan aset tetap di Dinas Sosial Kota Jambi yang terjadi berdasarkan hasil wawancara terdapat aset tetap yang hilang khususnya aset tetap yang tergolong dalam peralatan dan mesin seperti brandkas kantor, dan adanya aset tetap yang rusak beranamun belum diperbaiki, adanya kendaraan kantor yang seharusnya sudah habis masa pakainya tetapi tidak

diberikan perawatan, serta adanya peralatan kantor seperti lemari, kursi, meja yang seharusnya sudah habis masa pakainya tetapi masih digunakan.

Pengendalian intern pada Dinas Sosial juga diperlukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasional, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan berkaitan dengan aset tersebut telah dipatuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengendalian intern aset tetap Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Penelitian tentang Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yentina Siregar (2019) hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengendalian internal prosedur penerimaan dan pengeluaran persediaan sudah memadai karena sudah menjalankan indikator-indikator dari kelima aspek pengendalian internal, tetapi masalah-masalah yang muncul disebabkan oleh *job rolling* dalam waktu singkat, security pada penerimaan kurang memadai, kurangnya komunikasi antar anggota dan rangkap kerja pada clerk.

Gandi Mararu Jullie J.SondakhI Gede Suwetja (2019) meneliti Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hasil penelitian bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No.16. Saran sebaiknya perusahaan menerapkan metode penyusutan saldo menurun (*decline balanced method*) untuk aset tetap yang bukan bangunan. Dimana metode ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PSAK NO. 16 tentang aset tetap.

Persediaan merupakan salah satu aktiva perusahaan, oleh karena itu harus memiliki pengendalian internal yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi dan berpengaruh pada efisiensi biaya persediaan bahan baku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian internal persediaan dan penerapan metode *just in time* terhadap efisiensi biaya persediaan bahan baku PT. SIIX Electronics Indonesia. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah pengendalian internal persediaan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak ada efisiensi pada biaya persediaan bahan baku, begitupun dengan penerapan metode *just in time* tidak efisien terhadap biaya persediaan bahan baku, (Aznedra dan Endah Safitri, 2018).

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena pentingnya peranan aset tetap dalam membantu menjalankan kegiatan operasional Dinas Sosial Kota Jambi, sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui pengendalian intern aset tetap di Dinas Sosial Kota Jambi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda serta responden yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Sosial kota Jambi, karena masih sedikit peneliti tentang judul ini yang mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial khususnya Dinas Sosial Kota Jambi, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Jambi.

2. KAJAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta pengintegrasian atas hasilnya. Menurut Riandari (2013) Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa yang tujuannya untuk memantau proses pelaksanaan anggaran sehingga dapat diketahui mulai dari penciptaan anggaran tersebut sampai pada penggunaannya.

Pengendalian intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain dari suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian sasaran dalam keefektifan dan keefisienan operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Rumusan pengendalian intern yang digunakan oleh IAI saat ini yang dimuat dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ada dua pendekatan sistem pengendalian didalam organisasi (Bastian, 2001:55) yaitu: pendekatan dari sudut pengolahan transaksi organisasi dan pendekatan dari sudut aspek manajerial dan pengambilan keputusan.

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan atau lembaga, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan atau lembaga sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian intern disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (Cahyadi, 2012).

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP Nomor 7 Paragraf 4). Aset Tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi dan tidak dijual-belikan serta digunakan lebih dari satu tahun (periode akuntansi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi (Bastian, 2014).

Mulyadi (2002) dalam bukunya menyatakan bahwa aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Halim, 2007:110).

Pengendalian internal terhadap aset tetap adalah Keseluruhan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin dan mengarahkan keseluruhan proses perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, penatausahannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Aset dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Aset tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi mencapai Rp.578 juta. Aset tetap sangat berperan penting bagi sektor swasta maupun pemerintahan. Bagi sektor swasta, aset tetap memiliki peranan penting dalam membantuproses menghasilkan produksi baik berupa peralatan mesin, kendaraan operasional, tanah, bangunan maupun aset tetap lainnya. Ada beberapa alasan mengapa aset tetap perlu diberikan perhatian penting. Pertama, aset tetap memiliki harga yang relatif tinggi. Kedua, aset dibeli hanyasekali untuk waktu yang lama, yaitu aset ini ada ketika proyek pengadaan sudah selesai tidak banyak hal yang bisa dilakukan jika kesalahan ditemukan. Ketiga, aset tetap rentan terhadap depresiasi yang cepat pada nilainya jika tidak dirawat dengan baik selama masa manfaatnya (Adlar, 2014).

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan atau lembaga, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan atau lembaga sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian intern disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (Cahyadi, 2012).

Pengendalian Internal (internal control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP Nomor 7 Paragraf 4), (Santosa,2014).

Dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk tercapainya tujuan tersebut dan untuk mencapainya diperlukan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Pemerintah berusaha untuk membuat struktur pengendalian intern dengan baik, melaksanakan, dan mengawasinya agar efektivitas perusahaan bisa tercapai, pengendalian intern yang baik akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dihasilkan sehinggadata tersebut dapat dipercaya.

Gandi Mararu Jullie J.SondakhI Gede Suwetja (2019) meneliti Analisis PerlakuanAkuntansi Aset TetapPada PerusahaanUmum Badan Logistik Divisi Regional Provinsi SulawesiUtara dan Gorontalo. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis memperoleh hasil penelitian bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No.16. Saran sebaiknya perusahaan menerapkan metode penyusutan saldo menurun (*decline balanced method*) untuk aset tetap yang bukan bangunan. Dimanametode ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PSAK NO. 16 tentang aset tetap.

Yentina Siregar (2019) meneliti Analisis Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Persediaan Pada PT.Osi Electronics Batam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengendalian internal prosedur penerimaan dan pengeluaran persediaan sudah memadai karena sudah menjalankan indikator-indikator dari kelima aspek pengendalian internal, tetapi masalah-masalah yang muncul disebabkan oleh job rolling dalam waktu singkat, security pada penerimaan kurang memadai, kurangnya komunikasi antar anggota dan rangkap kerja pada clerk.

Aznedra Endah Safitri (2018) meneliti Analisis Pengendalian Internal Persediaan dan Penerapan Metode *Just In Time* Terhadap Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Studi Kasus PT. SIIX Electronic Indonesia. Hasil dari penelitian adalah pengendalian internal persediaan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak ada efisiensi pada biaya persediaan bahan baku, begitupun dengan penerapan metode *just in time* tidak efisien terhadap biaya persediaan bahan baku.

3. METODE

Objek penelitian ini yaitu pada Dinas Sosial Kota Jambi yang berlokasi di jalan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Pengendalian intern terdiri dari lima aspek yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Berikut item dari masing-masing aspek pengendalian intern.

Defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang ada.
- 2) Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakepemerintahan yang baik.
- 3) Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP Nomor 7 Paragraf 4).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Menurut S. Nasution Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan cara langsung melakukan wawancara dan observasi pada Dinas Sosial Kota Jambi terkait Pengendalian Intern Aset Tetap.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: *Interview*/Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden. Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data

tentang pengendalian intern Aset Tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi apakah sudah diterapkan secara efektif dan efisien. Selain wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen yang merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis (Cahyadi, 2012).

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisa berwujud keterangan uraian yang menggambarkan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Riandari, 2012).

4. HASIL

Penelitian ini menggunakan daftar uji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan data tersebut menghasilkan nilai sistem pengendalian intern pada Dinas Sosial Kota Jambi yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Dinas Sosial Kota Jambi

No	Unsur Sistem Pengendalian Intern	Jumlah Jawaban "Ya"	Jumlah Pertanyaan	Persentase (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	
1	Lingkungan Pengendalian	7	8	87,50	30	26,25	
2	Penilaian Risiko	4	4	100,00	20	20,00	
3	Kegiatan Pengendalian	12	13	92,31	25	23,08	
4	Informasi dan Komunikasi	4	4	100,00	10	10,00	
5	Pemantauan	2	2	100,00	15	15,00	
	Jumlah	29	31		100		
		Total Nilai Kriteria				94,33	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2 di atas, diperoleh total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi yaitu sebesar 94,33% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Jambi telah melaksanakan sistem pengendalian intern aset tetap secara sangat efektif sesuai kriteria yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008. Meskipun dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Jambi masih menghadapi beberapa hambatan, dimana hasil penilaian untuk tiap-tiap unsur disajikan sebagai berikut:

4.1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur lingkungan pengendalian memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 7 dari jumlah pertanyaan sebanyak 8 sehingga memperoleh persentase sebesar 87,50% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur lingkungan pengendalian diberi bobot sebesar 30% sehingga memperoleh nilai sebesar 26,25%.

Hasil observasi menunjukkan bahwa operator SIMAK BMN Dinas Sosial Kota Jambi memahami kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai aset tetap. Kemudian pemeriksaan fisik aset tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi terus dilakukan agar dapat memantau nilai manfaat aset tetap, sehingga aset yang diketahui habis nilai manfaatnya dapat dihapus atau dilelang agar dapat mengurangi biaya pemeliharaan aset. Namun Dinas Sosial Kota Jambi belum memberikan pelatihan kepada pegawainya mengenai pengelolaan dan perawatan aset tetap, sehingga pengelolaan dan perawatan aset tetap dilakukan belum optimal.

Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi telah menerapkan pengkodean aset tetap yang mencantumkan golongan, jenis, lokasi, dan tahun perolehan dalam mencatat aset tetap, hal ini bertujuan agar staf pengelola aset dapat mengontrol atau mengawasi kepemilikan aset tetap. Selain itu terdapat kartu aset tetap seperti pemeriksaan fisik aset tetap yang dimiliki setiap ruangan agar setiap masing-masing divisi dapat bertanggung jawab dengan aset tetap yang menjadi hak urusnya. Kemudian pembukuan daftar aset tetap secara keseluruhan juga telah dibuat sebagai rekapan dari laporan kartu aset tetap yang dimiliki setiap divisi dan untuk arsip atau dokumen mengenai aset tetap disimpan di Dinas Sosial Kota Jambi agar jika ada audit maka arsip atau dokumen dapat menjadi data pendukung kelengkapan data aset tetap.

Sistem pengendalian intern yang berjalan dengan baik, tidak lepas dari peran kepemimpinan yang baik juga. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa pimpinan memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen berbasis kinerja, dan senantiasa meningkatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi juga telah diuraikan secara jelas mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing pegawai guna mewujudkan peran aparat pengawasan intern yang baik di lingkungan Dinas Sosial Kota Jambi.

4.2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur penilaian risiko memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 4 dari jumlah pertanyaan sebanyak 4 sehingga memperoleh persentase sebesar 100% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur penilaian risiko diberi bobot sebesar 20% sehingga memperoleh nilai sebesar 20%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, penilaian risiko yang sudah ada pada Dinas Sosial Kota Jambi telah diterapkan secara menyeluruh. Dinas Sosial Kota Jambi memiliki mekanisme khusus dalam mengidentifikasi risiko pada pengendalian intern aset tetap, meskipun risiko tersebut sudah dapat dideteksi. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih terdapat aset tetap yang sudah tidak memadai atau rusak dan masih terdapat aset tetap yang hilang. Kemudian aset tetap yang rusak berat sudah diubah kondisi aset tetapnya menjadi aset tetap rusak berat berdasarkan dokumen sumber dan dilanjutkan dengan melakukan input di transaksi penghentian Aset tetap dari penggunaannya dan aset tetap yang hilang sudah di input di transaksi penghentian aset tetap dari penggunaan berdasarkan dokumen sumber.

4.3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur kegiatan pengendalian memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 12 dari jumlah pertanyaan sebanyak 13 sehingga memperoleh persentase sebesar 92,31% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur kegiatan pengendalian diberi bobot sebesar 25% sehingga memperoleh nilai sebesar 23,08%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, kegiatan pengendalian intern aset tetap yang sudah ada pada Dinas Sosial Kota Jambi telah mampu meminimalisir risiko dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Sosial Kota Jambi untuk pengendalian intern aset tetap.

Berdasarkan observasi awal bahwa dalam memperoleh aset tetap, Dinas Sosial Kota Jambi membutuhkan persetujuan tertulis dari kepala Dinas Sosial Kota Jambi atas pembelian aset tetap karena Kepala Dinas sebagai jabatan tertinggi di Dinas harus mengetahui dan mempertanggungjawabkan kebutuhan pembelian atau pengadaan aset tetap. Kemudian pembelian aset tetap selalu masuk dalam anggaran Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk setiap pembelian aset tetap selalu didukung oleh dokumen yang lengkap dan bukti kepemilikan yang sah. Selanjutnya dalam menjual aset tetap, Dinas Sosial Kota Jambi membutuhkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Sosial Kota Jambi atas penjualan aset tetap.

Kemudian aset tetap yang nilai bukunya sudah habis tetapi masih digunakan selalu dicatat dalam akun aset tetap.

Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa semua aset tetap di Dinas Sosial Kota Jambi telah dirawat dan dipelihara dengan baik oleh pengguna aset. Kemudian untuk biaya perawatan dan pemeliharaan aset tetap di Dinas Sosial Kota Jambi ada anggaran khusus yang disediakan dari APBD. Namun aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi tidak di asuransikan karena dapat menambah anggaran tambahan. Kemudian mutasi aset tetap sudah dilengkapi dengan dokumen sumber dan setiap mutasi aset tetap dilakukan laporan rutin. Selanjutnya aset tetap yang dikirim/diterima antara satuan kerja sudah di input di transaksi transfer dengan dokumen sumber berupa berita acara serah terima penatausahaan dan penginputan pembelian rumah dinas melalui pengembang (*developer*) atau perorangan sudah dipisahkan penginputan aset tetap tanah dan gedung bangunannya.

4.4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur informasi dan komunikasi memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 4 dari jumlah pertanyaan sebanyak 4 sehingga memperoleh persentase sebesar 100% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur informasi dan komunikasi diberi bobot sebesar 10% sehingga memperoleh nilai sebesar 10%.

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, informasi dan komunikasi yang sudah ada pada Dinas Sosial Kota Jambi mampu mendukung pengendalian intern pada aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rincian tugas pokok dan fungsi yang digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam mengurus aset tetap. Selain itu, buku pedoman, prosedur, surat edaran, situs internet, media sosial, serta aplikasi digunakan sebagai media penghubung informasi dan komunikasi antara pegawai yang satu dengan yang lain. Semakin baik informasi dan komunikasi yang berjalan di lingkungan Dinas Sosial Kota Jambi, maka akan semakin mendukung Dinas Sosial Kota Jambi dalam mencapai tujuan. Kemudian dokumen aset tetap secara berkala dicocokkan dengan buku besar dan dokumen aset tetap yang dibuat menunjukkan rincian seperti lokasi dan persentase penyusutan.

4.5. Pemantauan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur pemantauan memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 2 dari jumlah pertanyaan sebanyak 2 sehingga memperoleh persentase sebesar 100% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur pemantauan diberi bobot sebesar 15% sehingga memperoleh nilai sebesar 15%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, pemantauan yang sudah dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Jambi sudah berfungsi dengan baik. Pemantauan pada Dinas Sosial Kota Jambi dibantu oleh BPK, BPKP dan Inspektorat. Berdasarkan hasil dari penelitian, inspektorat belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan rekonsiliasi data yang dilakukan terhadap aset tetap dan selalu dilakukan pencocokan antara hasil pemeriksaan fisik dengan daftar aset tetap yang dimiliki Dinas Sosial Kota Jambi.

5. PEMBAHASAN

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset, antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Pada umumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP, dimana salah satunya yaitu berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu unsur dalam laporan keuangan daerah yang harus dikelola dengan baik. Hal ini karena berkaitan dengan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif secara keseluruhan pada sistem pengendalian intern aset tetap menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi termasuk kedalam kategori Sangat Efektif dengan rata-rata persentase penilaian 94,33%. Artinya sistem pengendalian intern aset tetap secara umum telah diterapkan dengan sangat efektif, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan, kelemahan yang ditemukan dalam penerapan sistem pengendalian intern aset tetap adalah belum adanya pemberian

pelatihan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Jambi mengenai pengelolaan dan perawatan aset tetap dan aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi tidak atau belum di asuransikan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi ditelah dihitung total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern aset tetap pada Dinas Sosial Kota Jambi yaitu sebesar 94,33% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif yang terdiri dari:

- 1) Lingkungan Pengendalian sebesar 26,25%.
- 2) Penilaian Risiko sebesar 20%.
- 3) Kegiatan Pengendalian sebesar 23,08%.
- 4) Informasi dan Komunikasi sebesar 10%.
- 5) Pemantauan sebesar 15%.

Kekurangan dalam pengendalian intern aset tetap pada Kantor Dinas Sosial Kota Jambi adalah:

- 1) Belum adanya pemberian pelatihan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Jambi mengenai pengelolaan dan perawatan aset tetap, dan
- 2) Seluruh aset tetap Dinas Sosial Kota Jambi tidak atau belum di asuransikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu :

- 1) Dinas Sosial Kota Jambi sebaiknya melakukan sosialisasi atas pentingnya sistem pengendalian intern dalam upaya pengendalian intern aset tetap.
- 2) Dinas Sosial Kota Jambi sebaiknya memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawan pegawai tentang pengelolaan aset tetap.
- 3) Dinas Sosial Kota Jambi sebaiknya memiliki mekanisme dalam penilaian risiko agar risiko yang akan dihadapi dapat segera diidentifikasi dan diambil langkah untuk menangani dan meminimalisir risiko tersebut.
- 4) Dinas Sosial Kota Jambi sebaiknya meningkatkan pengamanan aset, seperti membatasi penggunaan aset diluar jam kerja, pemberian identitas aset serta rutin melaksanakan pengecekan barang untuk menghindari kehilangan aset dan memudahkan untuk pendataan aset.
- 5) Bidang aset selaku pengelola barang sebaiknya terus melaksanakan inventarisasi dan penilaian aset tetap sampai selesai.
- 6) Bidang aset sebaiknya menyusun Laporan Barang Milik Daerah (KIB) dan melakukan rekonsiliasi Aset Tetap bersama dengan Bidang Akuntansi.
- 7) Inpektorat sebaiknya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap dan melakukan monitoring perkembangan atas fungsi pengawasan tersebut.
- 8) Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang relevan, yaitu sebaiknya memilih objek penelitian yang memiliki masalah yang jelas, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aznedra, dan Safitri, Endah. 2018. *Analisis Pengendalian Internal Persediaan dan Penerapan Metode Just In Time Terhadap Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Studi Kasus PT. SIIIX Electronic Indonesia*. Jurnal Akuntansi.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Jusup, Al Haryono. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Kaligis, Gabriella Magrieta, et al. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Kota Belitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universtas Sam Ratulangi Manado.

- Kartikahadi, Hans. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Makaluas, Jesella Lourina., dan Pontoh, Winston. 2018. *Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap Pada PT. Lumbang Berkat Indonesia*. Jurnal Akuntansi.
- Mararu, Gandi., Sondakh, Jullie J., dan Suwetja, Gandi I. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Jurnal Akuntansi.
- Martani, Dwi. 2014. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perancangan dan pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- . 2002. *Auditing*, Edisi ke-6, Badan Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- . 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- . 2008. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- . 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pujiono, dan Shim, Julharman Asverawan. 2019. *Analysis Of The Internal Control Of Merchandise Inventory At Toko Permai Pekanbaru*. Jurnal Akuntansi.
- Riandari, Esti. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas di Biro Keuangan Sekretarian Kementrian*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, Yentina. 2019. *Analisis Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Persediaan Pada PT. Osi Electronics Batam*. jurnal Akuntansi.
- Trysnani, Emy Dwi. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap*. Jurnal Akuntansi .